

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberhasilan implementasi kebijakan publik perlu menjadi perhatian semua pihak. Tujuan yang diharapkan dari suatu kebijakan supaya dapat terwujud maka mulai dari persiapan proses implementasi kebijakan harus menggunakan sumber daya yang ada, melibatkan orang atau kelompok orang dalam implementasi, dan menginterpretasikan kebijakan. Selain itu program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat (Tjilen, 2019). Upaya implementasi kebijakan dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari kerja sama pemerintah, masyarakat maupun swasta dan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan negara. Namun demikian, setiap negara di dunia mengalami masalah kesehatan dan yang menjadi perhatian saat ini yaitu berkaitan dengan masalah gizi. bahwa gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Makanan yang diberikan sehari-hari harus mengandung semua zat gizi sesuai kebutuhan, sehingga menunjang pertumbuhan yang optimal dan dapat mencegah penyakit defisiensi, mencegah keracunan dan juga mencegah timbulnya penyakit yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak (Hadiyono, 2020). Dikalangan masyarakat terdapat dua status gizi yang dikenal, yaitu gizi kurang dan gizi buruk. Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi, atau nutrisinya dibawah rata- Gizi kurang adalah

kekurangan bahan-bahan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan gizi buruk sendiri adalah kondisi terparah dari seseorang yang mengalami kekurangan gizi yang menyebabkan degradasi imunitas tubuh sehingga rawan terkena penyakit.

Masalah gizi menjadi salah satu penghambat dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Saat ini, permasalahan gizi yang menjadi tantangan bangsa Indonesia yaitu Stunting. Menurut Perpres No. 72 Tahun 2021 Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Nur Azizah, Nastia, 2022).

Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang lain pada umumnya (yang seusia) yang disebabkan kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin/ bayi. Kekurangan gizi terjadi sejak dalam kandungan dan pada masa awal anak lahir, tetapi stunting baru nampak setelah anak berusia 2 tahun Selain itu, stunting juga didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan pada anak di bawah usia 5 (lima) tahun yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang menetap, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting menghambat perkembangan otak dan meningkatkan kemungkinan mendapatkan gangguan kronis di kemudian hari, karena stunting dimulai sejak dalam kandungan dan tidak muncul dengan sendirinya sampai anak berusia 2 tahun.

Stunting pada balita perlu menjadi perhatian khusus karena dapat menghambat perkembangan fisik dan mental anak. Stunting berkaitan dengan peningkatan risiko kesakitan dan kematian serta terhambatnya pertumbuhan kemampuan anak dalam menampilkan keterampilan gerak yang aktif dan mental. Balita yang mengalami stunting memiliki risiko terjadinya penurunan kemampuan yang cerdas dan peningkatan risiko penyakit degeneratif di masa mendatang. Bayi berusia 0-6 bulan, hanya memerlukan Air Susu Ibu (ASI) saja sebagai nutrisi utama. Setelah 6 bulan, dapat diberikan Makanan Pendamping ASI (MPASI). Bayi berusia >6 bulan memerlukan MP-ASI sebagai nutrisi tambahan untuk pertumbuhan optimal.

Program Stunting di Indonesia difokuskan pada pencegahan dan penanganan stunting. Pencegahan stunting dilakukan dengan memastikan ibu hamil dan anak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Penanganan stunting dilakukan dengan memberikan suplementasi gizi dan terapi gizi. Berikut adalah beberapa program stunting di Indonesia: (1) Program Biaya Operasional Kesehatan (BOK), (2) Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), (3) Program Intervensi Gizi Berbasis Keluarga (IGBB).

Aceh Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki prevalensi stunting yang tinggi yaitu di Aceh Timur. Menurut laporan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 yang melaporkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Timur masih memiliki nilai tertinggi sebesar 29,70% bahkan angka tersebut masih di atas target nasional.

Disisi lain dikutip dari artikel [marjinal.id](https://www.marjinal.id) tahun 2024 melaporkan bahwa di Kabupaten Aceh Timur memiliki 7 kecamatan yang memiliki total ribuan kasus. Dalam berita tersebut Abdullah, S.KM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mengungkapkan 7 Kecamatan yang masuk kedalam kategori kasus

stunting tertinggi dan masuk dalam wilayah kerja Puskesmas yaitu Puskesmas Kecamatan Darul Falah terdapat 254 kasus, Puskesmas Rantau Perlak 152 kasus, Puskesmas Kecamatan Peurlak 157 kasus, Puskesmas Idi Timur 145 kasus, Puskesmas Bireun Bayeun 122 kasus, Puskesmas Darul Aman 117 kasus serta Puskesmas kecamatan Rantau Slamat dengan 89 kasus. Dari total keseluruhan tersebut mencapai 1036 kasus dan keseluruhannya balita gizi kurang. Selain itu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat tersebut juga menambahkan bahwa ada sebagian besar penderita stunting belum sedikitpun tersentuh pelayanan kesehatan. (Marjinal.id, 2024).

Fenomena pernyataan sebelumnya menunjukkan bahwa masalah stunting di Kabupaten Aceh Timur masih menjadi persoalan serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak agar kasus stunting dapat terhenti dan mencegah kasus tersebut naik kembali. Peningkatan kasus prevalensi stunting di Aceh Timur diindikasikan oleh beberapa faktor, meliputi; (1) Pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan akses terhadap pelayanan kesehatan dan gizi, (2) Kemiskinan yang masih tinggi di Aceh Timur, (3) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Menariknya upaya mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengeluarkan kebijakan tentang percepatan penurunan stunting dengan berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 pada pasal 1 menyebutkan bahwa pemerintah daerah melakukan kegiatan intervensi spesifik, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Bersama UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas menjalankan program intervensi spesifik dalam rangka menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Timur.

Oleh karena itu, guna mencapai kondisi yang diharapkan, tantangan

pertama yang perlu diatasi adalah sektor kesehatan, khususnya dalam menangani kasus Stunting. Gizi buruk, yang tercermin dalam bentuk Stunting, dapat diidentifikasi sebagai kendala utama yang menghambat pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Mengatasi gizi buruk memerlukan pendekatan yang komprehensif dan lintas sektor, termasuk intervensi dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan akses ke gizi yang baik dan memadai.

Dalam upaya menurunkan angka stunting, sejumlah program dan cara penanggulangan telah dirancang untuk mendukung kesehatan ibu hamil dan anak. Salah satu program utama adalah penyuluhan dan konseling bagi ibu hamil, yang bertujuan untuk memastikan mereka memahami pentingnya memenuhi 1000 hari pertama kehidupan (HPK) anak. Program ini memberikan informasi mengenai nutrisi yang diperlukan selama kehamilan, sehingga ibu dapat memberikan yang terbaik bagi perkembangan janin. Selain itu, konseling untuk ibu menyusui juga menjadi fokus, di mana ibu didorong untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi mereka selama enam bulan pertama, karena ASI merupakan sumber nutrisi yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Program pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang bergizi dan kaya akan protein juga sangat penting, terutama setelah bayi berusia enam bulan, untuk memastikan anak mendapatkan nutrisi yang cukup. Selain itu, pemberian program makanan tambahan (PMT) ditujukan bagi ibu hamil yang berisiko, untuk memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang memadai. Pemantauan perkembangan anak melalui Posyandu secara berkala juga merupakan bagian dari program ini, di mana anak-anak diperiksa untuk mendeteksi masalah gizi sejak

dini.

Penanggulangan stunting, beberapa cara yang diterapkan meliputi pemberian PMT untuk meningkatkan status gizi ibu hamil dan anak. Selain itu, pendirian Rumoh Gizi Gampong sebagai pusat gizi di tingkat desa memberikan edukasi dan layanan gizi kepada masyarakat, sehingga mereka lebih sadar akan pentingnya gizi yang baik. Penyuluhan dan konseling yang berkelanjutan bagi ibu hamil dan menyusui juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi yang baik. Semua langkah ini harus didukung oleh kerja sama lintas sektor, termasuk peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai, untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kesehatan ibu dan anak. Dengan melaksanakan berbagai program dan cara penanggulangan ini secara terpadu, diharapkan angka stunting dapat diturunkan secara signifikan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan sehat dan optimal (Sumber: Puskesmas Kecamatan Idi Rayeuk, Tahun 2024).

Program pencegahan stunting di Gampong Keude Blang belum berjalan maksimal karena penyediaan asupan gizi yang sehat dan cukup bagi warga, khususnya anak-anak stunting, tidak sesuai dengan rencana. Meskipun program sudah menetapkan untuk masak makanan bergizi oleh ibu-ibu kader dan nantinya di bagi ke anak penderita stunting akan hal tetapi makanan bergizi tersebut bukan di makan oleh anak stunting akan tetapi di makan semua keluarga yang ada di rumah. Situasi ini mengurangi efektivitas program dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan status gizi anak-anak stunting warga Gampong Keude Blang terhadap program pencegahan stunting.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian secara lebih mendalam tentang **“Implementasi Program Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Puskesmas Kecamatan Idi rayeuk Kabupaten Aceh Timur”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Penanggulangan Dan Pencegahan Stunting Di Puskesmas Idi Rayeuk Aceh Timur?
2. Apa penghambat Implementasi Program Penanggulangan Dan Pencegahan Stunting Di Puskesmas Idi Rayeuk Aceh Timur?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi program penanggulangan dan pencegahan stunting di Idi Rayeuk Aceh Timur.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan program penanggulangan dan Pencegahan Stunting di Idi Rayeuk Aceh Timur

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis akan membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi program pencegahan dan penanggulangan stunting di Pukesmas Idi Rayeuk Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui penghambat Implementasi Program Penanggulangan Dan Pencegahan Stunting Di Puskesmas Idi Rayeuk Aceh Timur.

## **1.5 Manfaat penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan konsep kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting dan pengembangan konsep bagi ilmu administrasi *public*.

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan rekomendasi untuk masyarakat dan segala pihak yang terlibat dalam rangka untuk mengevaluasi implementasi program pencegahan dan penanggulangan stunting di puskesmas Idi Rayeuk Aceh Timur.